

PENGUATAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PRODUK OLAHAN MAKANAN MENGHADAPI PASAR TUNGGAL ASEAN DI SUMATERA BARAT

Nasrul Hosen¹⁾ dan Harmaini²⁾

¹⁾Peneliti Utama pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat
²⁾Penyuluh pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat
Jl. Raya Padang-Solok KM 40. Sukarami, Solok, Fak.0755-31138, e-mal:

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian, karena sektor pertanian merupakan lapangan kerja utama bagi hampir 50% penduduk Sumatera Barat. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB cukup tinggi (23,01%) dan relatif besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Pengembangan industri rumah tangga (IRT) pengolahan produk makanan merupakan salah satu upaya memperoleh nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Aneka bahan baku komoditas pangan tersedia. Jumlah IRT produk olahan makanan mencapai 4.292 unit, menyerap tenaga kerja 14.945 orang dan memberikan nilai tambah Rp. 413,0 milyar setahun. Survey dilakukan terhadap lebih 50 sampel macam produk olahan dan 30 buah industri pengolahan terdiri dari industri kecil/menengah, UP3HP, dan industri mikro (IRT) pada 3 kota, Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh bulan Februari-Maret 2016. Hasil kajian menunjukkan, bahwa ditemui beberapa kelemahan IRT tersebut: (1) Belum semua IRT mempunyai izin usaha dan mencantumkan label halalMUI di kemasan, kecuali industri kecil/menengah; (2) Masa kedaluarsa belum semua produk mencantumkan dengan tegas; (3) Kandungan gizi tidak tercantum dan hanya mencantumkan komposisi produk; (4) Alamat sudah dicantumkan, (5) Kemasan sebagian besar produk cukup menarik, kecuali produk IRT dan UP3HP. Kelemahan produk olahan tersebut harus dibenahi untuk memperkuat daya saing menghadapi MEA. Untuk itu diperlukan fasilitasi dan regulasi oleh pemerintah: (i) pembinaan menuju efisiensi usaha dan penguatan legalitas produk dengan mencantumkan izin usaha dan berbagai data/informasi tentang produk pada kemasan, (ii) mempermudah akses IRT ke sumber modal, (iii) Membangun kemitraan sistem bapak angkat untuk menjamin standar mutu dan keberlanjutan pasar (iv) Pencerdasan konsumen dalam memilih produk makanan jadi.

Kata Kunci: IRT, informal, produk olahan, penguatan, MEA

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Sumatera Barat mencapai lebih 5,0 juta jiwa dengan jumlah rumah tangga 1,2 juta lebih. Sebanyak 644.610 rumah tangga bekerja di sektor pertanian dalam arti luas dan 66,1% dari Rumah Tangga Pertanian (RTP) tersebut berusaha di lahan dan dengan jenis usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ternak. Pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian, karena sektor pertanian merupakan lapangan kerja utama bagi sebagian besar penduduk Sumatera Barat. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2014 sebesar 23,01% dan relatif besar dibandingkan dengan sumbangan sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa dan lainnya (Bappeda, 2014).

Permasalahan yang dihadapi petani adalah jaminan pasar produk primer terutama produk primer non-beras. Dukungan pasardengan harga yang seimbang, dan dukungan sektor hilir terutama Industri Rumah Tangga (IRT) dalam menyerap produk primer sektor pertanian lokal juga masih lemah. Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya promosi,

distribusi, kemasan dan kualitas serta faktor penunjang penguatan daya saing terhadap produk impor sejenis. Secara nasional permintaan industri pengolahan produk makanan jadi meningkat selama periode 1990-2011. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan produk primer meningkat sejalan dengan meningkatnya rata-rata pendapatan per kapita masyarakat (Kasyrino, 2013). Arah pembangunan pertanian daerah ke depan diharapkan memprioritaskan penguatan sektor hilir terutama IRT guna mampu menghela pembangunan sektor hulu. Untuk itu dituntut pembangunan pertanian yang berimbang antara aspek produksi (sektor hulu), pasar dan diikuti dengan pengembangan sektor hilir memberikan potensi dampak yang menjanjikan (Rahmat, 2013). Khusus pengembangan sektor hilir harus mendapat perhatian serius oleh berbagai pemangku kepentingan, tidak saja pemerintah tetapi dukungan swasta sangat dibutuhkan. Potensi sektor hilir dari segi jumlah IRT khusus memproduksi produk olahan berbahan baku pangan lokal jumlah mencapai lebih 4500 usaha (Disperindag, 2015). IRT tersebut mempunyai berbagai kelemahan baik dari sisi produk olahan, maupun dari sisi pengelolaan dan modal. Pengembangan sektor hilir ini diarahkan prioritas utama adalah penguatan daya saing produk, dan tujuan itu tidak terlepas dari perbaikan pengelolaan dan dukungan modal usaha. IRT ini umumnya masuk kategori sektor informal yang mempunyai berbagai kelemahan sehingga daya saingnya rendah. Dukungan inovasi teknologi pengolahan mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing (Munarso, 2013). Menghadapi pasar tunggal Asean (MEA), sektor informal tersebut harus diperkuat sehingga mampu bersaing dengan produk-produk luar. Berkembang dan kuatnya sektor informal bidang pengolahan hasil diharapkan akan mengurangi tantangan regional dalam pengembangan sektor pertanian karena semakin terbatasnya luas lahan budidaya, khususnya lahan sawah seperti adanya alih fungsi lahan, terbatasnya potensi lahan kering dan semakin sempitnya luas penguasaan lahan oleh rumah tangga tani akibat fragmentasi lahan dan diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja pedesaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan: (i) Potensi dan kelemahan IRT produk olahan berbahan baku produksi pertanian lokal; (ii) Strategi penguatan IRT guna meningkatkan daya saing menghadapi MEA.

METODOLOGI

Kajian ini merupakan perpaduan analisis antara data sekunder dan data primer. Sasaran kajian adalah Industri Rumah Tangga (IRT) yang melakukan usaha pengolahan makan jadi. Kajian dilakukan dalam bentuk eksplorasi (Singarimbun dan Effendi, 1982) pada bulan Februari-Maret 2016. Lokasi kajian pada 3 kota sebagai pasar dan sentra produk olahan, Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh dengan jumlah sampel lebih 50 macam produk olahan, 30 industri pengolahan yang terdiri dari industri skala kecil/menengah, mikro IRT yang bermitra dengan industri kecil dan IRT yang tidak bermitra (mandiri) serta UP3HP binaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Data yang diperlukan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari instansi terkait dan sumber lainnya termasuk hasil-hasil kajian yang terkait dengan tujuan kajian ini. Data primer bersumber dari tempat/kios penjualan produk olahan dan industri pengolahan produk makanan. Parameter utama (data/informasi) tentang produk olahan tersebut adalah data yang dicantumkan pada kemasan produk olahan yaitu: izin usaha, alamat, label halal (keluaran, kandungan gizi, komposisi, masa kedaluarsa, bentuk kemasan (menarik atau kurang/tidak menarik) dan lainnya. Analisis data dilakukan secara tabulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi dan Penggunaan Produk Pertanian

Diantara tanaman pangan, pertumbuhan produksi tertinggi adalah ubi kayu dan ubi jalar berturut-turut 15% dan 13,5% per tahun. Komoditas pangan lainnya termasuk padi pertumbuhan produksinya dibawah 5% pertahun (Bappeda, 2013). Produk primer tanaman pangan, hortikultura dan produk ternak (daging dan telur) sebagian digunakan oleh IRT

sebagai bahan baku untuk menghasilkan berbagai jenis produk olahan makanan jadi (Tabel 1). Dengan diberlakukan pasar tunggal Asean (MEA) yang terdiri dari Negara Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dengan jumlah penduduk lebih dari 500 jt jiwa dan 50% berada di Indonesia. MEA bisa menjadi peluang dan tantangan pasar bagi produk primer maupun produk olahan sektor pertanian (Husen, 2014). Oleh karena itu Indonesia harus berbenah terutama dari mutu produk primer dan kekhasan produk olahan baik dari sisi cita rasa maupun kemasan disertai informasi penguatan daya saing lainnya.

Tabel 1. Keragaman komoditas pangan dan hortikultura di Sumatera Barat, 2014*

No	Komoditas	Luas panen/populasi (ha, ptg)*	Produksi (t)*	Pertumbuhan produksi per tahun (%)**	Mendukung industri rumah tangga***
1.	Padi	467529 ha	2339682	4,1	Ya
2.	Jagung	75657 ha	495497	5,0	Ya
3.	Ubi kayu	5502 ha	213647	15,0	Ya
4.	Ubi jalar	4372 ha	124881	13,5	Ya
5.	Kacang tanah	6819 ha	9597	3,2	Ya
6.	Bawang merah	3670 ha	35838	14,5	Ya
7.	Kentang	1829 ha	31300	1,7	Ya
8.	Kubis	2711 ha	85632	0,0	Tidak
9.	Cabe keriting	6680 ha	57671	15,6	Tidak
10.	Tomat	2183 ha	65313	15,0	Tidak
11.	Wortel	1205 ha	22637	17,5	Tidak
12.	Pisang	1825638 batang	137347	13,9	Tidak
13.	Jeruk	379953 batang	41837	13,7	tidak
14.	Pepaya	164352 batang	11622	6,1	tidak
15.	Sapi potong	Ekor	513.255	8,0	Ya
16.	Unggas/telur	Ekor	14.946.984	8,0	Ya

*Sumber: Bappeda (2014); **Bappeda (2013); ***Hasil survei

Potret Usaha Produk Olahan

Potensi pengembangan usaha produk olahan

Pembangunan pertanian yang didukung oleh berbagai inovasi teknologi telah berhasil meningkatkan produksi berbagai komoditas, baik komoditas tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan dan peternakan. Akan tetapi peningkatan produksi ini belum banyak menghasilkan nilai tambah bagi petani karena hasil produksi dipasarkan dalam bentuk segar. Karena itu diperlukan berbagai usaha agar keluarga tani mampu mengolah sebagian dari hasil produksinya menjadi produk olahan atau mengembangkan IRT agar mampu menyerap bahan baku produk pertanian lokal. Upaya pemerintah daerah dalam hal ini telah melakukan fasilitasi mendorong penumbuhan unit usaha IRT. Sebagai contoh, Dinas Pertanian telah menumbuhkan dan membina sejumlah usaha pengolahan hasil dibawah naungan kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan) yang dikenal

dengan Unit Pelayanan Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) di berbagai sentra produksi suatu komoditas. Jumlah IRT berbahan baku produk pertanian lokal yang tumbuh sesuai dengan dinamika pembangunan ekonomi mencapai 4.292 unit, sedangkan jumlah industri kecil dan menengah di Sumatera Barat mencapai 14.810 unit. Jumlah serapan tenaga kerja untuk IRT saja 14.945 orang dan serapan untuk total industri kecil dan menengah sebanyak 58.912 orang. Khusus untuk IRT produk olahan total nilai produksi setahun mencapai Rp. 745,0 M dan memberikan nilai tambah Rp. 413,0 M (Disperindag, 2015) (Tabel 2). Menghadapi perdagangan bebas pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah berjalan, maka produk olahan akan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Karena itu peningkatan mutu menjadi salah satu kunci utama untuk keberhasilan meningkatkan daya saing produk olahan lokal.

Pengembangan UP3HP dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan berkoordinasi dengan institusi terkait di Kabupten/Kota dimana UP3HP berada. Langkah pengembangan dilakukan secara bertahap dengan acuan yang jelas. UP3HP yang berada diseluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dikelompokkan menjadi tiga kelas sesuai dengan kemajuan yang telah dicapainya. Untuk menentukan tingkatan tersebut dibuat parameter yang terukur agar klasifikasi UP3HP bisa dilaksanakan dengan tepat. Bagi UP3HP yang masih berada pada tahap awal, pembinaannya masih fokus pada teknologi pengolahan dan bantuan peralatan utama. Bagi UP3HP yang sudah maju pembinaannya diarahkan pada peningkatan mutu, anitasi dan keamanan pangan, aspek manajerial, inovasi produk dan perluasan pemasaran.

Sejak 10 tahun terakhir ini telah ditumbuhkan dan difasilitasi 145 unit UP3HP yang tersebar di kabupaten/ kota. Indikator berkembangnya UP3HP tergambar dari tumbuh dan berkembangnya produksi olahan hasil pertanian dan pengembangan pemasaran produk. Pembinaan terhadap UP3HP dilakukan dalam penerapan kaidah *Good Handling Practices* (GHP) dan *Good Manufactur Practices* (GMP), terutama berkaitan dengan aspek proses produksi, teknologi produksi, keamanan pangan, standarisasi produk, labeling dan kemasan.

Mendukung pengembangan IRT terutama yang lemah modal sebagian telah memanfaatkan dana pinjaman dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang ada di wilayahnya. Potensi LKM-A yang ada di setiap desa cukup membantu dalam pengembangan IRT terutama yang berskala mikro(rumahan) dalam pengadaan bahan baku (Hosen, et.al, 2013 dan Hosen, 2014). Aneka produk olahan dihasilkan oleh IRT dengan bahan baku 12% dari beras dan jagung, 34% umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar kentang, talas), 21% kacang-kacangan, 9% hasil ternak (daging, kulit dan telur), 24% lainnya (pisang, enau, cabe, bawang dan lainnya).

Tabel 2. Jumlah usaha IRT produk olahan berbahan baku hasil pertanian dan serapan tenaga kerja menurut kabupaten/kotadi Sumatera Barat, 2015*

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha	T. Kerja (Org)
1.	Sijunjung	62	247
2.	Dharmasraya	77	295
3.	Solok	118	469
4.	Solsel	73	199
5.	Pessel	291	1054
6.	Pd-Pariaman	418	1075
7.	Tanah Datar	579	2041
8.	Agam	18	128
9.	Limapuluh Kota	153	1236
10.	Pasaman Barat	271	547
11.	Pasaman	281	852
12.	Pasaman	281	852
13.	Ko. Padangpanjang	140	559
14.	Ko. Sawahlunto	220	614
15.	Ko. Padang	971	3122
16.	Ko. Bukittinggi	63	246
17.	Ko. Solok	95	561
18.	Ko.Pariaman	106	520
19.	Ko. Payakumbuh	325	1091
	Jumlah	4542	15708

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat (2015)

Kelemahan produk olahan

Pengembangan usahatani yang semula berorientasi produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh yaitu usahatani yang terpadu antara agroinput (hulu) kegiatan produksi dan pengolahan serta pemasaran. Wujud usaha yang diharapkan adalah berkembangannya agroindustri pedesaan yang bermutu, berdaya saing dan tingkat keamanan pangan yang terjamin. Pengembangan agroindustri pedesaan dimaksudkan agar nilai tambah bisa diraih petani atau IRT di pedesaan serta berkembangnya kluster industri komoditi spesifik di pedesaan.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2008 terus konsisten melakukan pembinaan terhadap petani dikawasan sentra produksi komoditi di bawah naungan kelembagaan kelompok UP3HP dari aspek: mutu, manajemen, proses produksi, peningkatan penampilan kemasan, standar produk serta ditunjang dengan *food security* dan halal. Pemasaran adakalanya juga menjadi kendala, untuk itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui kerjasama dengan berbagai pihak, secara bertahap masalah ini bisa diatasi. Untuk itu yang sangat diperlukan adalah kesadaran bersama dari masing-masing anggota kelompok UP3HP untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.

Hasil survei pada 3 kota (Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh) diperoleh gambaran tentang profil produk olahan yang dipasarkan pada outlet/kios menunjukkan bahwa belum semua jenis produk olahan baik industri kecil/menengah, industri mikro IRT sebagai anak angkat, UP3HP maupun IRT yang mandiri mencantumkan beberapa data/informasi produk pada kemasan. Informasi masa kedaluarsa produk dan label halal yang benar belum semua produk dicantumkan dengan jelas pada kemasan produk (Tabel 3).

Keripik sanjai, keripik balado, dan rendang daging merupakan produk olahan spesifik Sumatera Barat. Keripik sanjai terkenal dari Bukittinggi, keripik balado dari Kota Padang, dan rendang daging umumnya dari berbagai daerah seperti Payakumbuh, Batusangkar, Pariaman dan Solok di Sumatera Barat. Data/informasi tentang ketiga produk olahan tersebut belum memenuhi standar. Ketiga produk olahan menjadi andalan Sumatera Barat dan seharusnya diperkuat daya saingnya terutama dengan mencantumkan masa kedaluarsa, label halal resmi dari BP-POM MUI dan informasi lainnya serta kemasan yang menarik agar

memenuhi standar produk sehingga menarik bagi konsumen, terutama konsumen mancanegara (turis) atau menjadi produk ekspor dalam konteks MEA.

Kelemahan lainnya adalah umunya IRT lemah modal dalam mengembangkan skala usaha, bentuk dan kualitas produk. Pemanfaatan fasilitas skim kredit dari Bank juga terbatas. Binaan dari stakeholder dalam membangun jejaring pasar juga masih terbatas. Selama ini pembinaan terhadap usaha pengolahan hasil skala rumah tangga masih terjadi tumpang tindih antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Seperti Dinas Pertanian menumbuh kembangkan usaha pengolahan hasil (UP3HP) di tingkat kelompok atau perorangan.

Tabel 3. Keragaan beberapa data/informasi yang tertera pada kemasan produk olahan usaha pengolahan produk makanan di Sumatera Barat, 2016*

No	Parameter	Pencantuman data/informasi pada kemasan (%)			
		Industri Kecil/menengah	Industri mikro mitra (IRT)	Industri mikro binaan (UP3HP)	Industri mikro mandiri (IRT)
1	Izin Usaha/P-IRT	100	100	80	75
2	Masa kedaluarsa				
	- Tercantum jelas	60	40	5	25
	- Tercantum tapi tidak ditandai	40	60	85	0
	- Tidak tercantum	0	0	10	75
3	Label halal	0	0	0	
	- Ada sesuai MUI-POM	35	15	0	0
	- Hanya ada tertulis	65	50	60	50
	- Tidak tertulis	0	35	40	50
4	Kandungan gizi	0	0	0	0
5	Komposisi bahan baku	100	100	90	90
6	Nama dan alamat IRT	100	100	100	100
7	Bentuk kemasan				
	- Menarik	100	75	85	25
	- Kurang menarik	0	25	15	75

*Hasil survey

Strategi Penguatan dan Pengembangan

1. Penguatan legalitas peroduk olahan dengan mencantumkan beberapa data/informasi tentang produk olahan dan profil IRT.

Data/informasi yang harus dicantumkan pada kemasan produk diantaranya adalah izin usaha, nama dan alamat IRT, ekpayer, label halal MUI, komposisi, kandungan gizi. Penguatan IRT tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan mempermudah pengurusan perizinan oleh pemangku kepentingan di setiap daerah.

2. Peningkatan mutu produk, SDM pengelola dan masaran.

Kegiatan peningkatan mutu ditujukan pada standarisasi produk, sanitasi produksi, dan keamanan pangan. Peningkatan SDM terutama dari aspek manajerial, penerapan inovasi pengolahan dan perluasan jaringan pasar. Dalam jangka menengah peningkatan mutu harus menjadi perhatian oleh pemangku kepentingan yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Koordinasi dan kerjasama berbagai pihak terkait untuk memperkuat IRT seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Instansi terkait lainnya sangat diperlukan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota terutama pada sentra produk olahan dan sentra bahan baku lokal untuk produk olahan makanan jadi di Sumatera Barat.

3. Membangun kelembagaan pasar

- a. Membangun kerjasama pasar produk olahan salah satunya melalui sistem bapak angkat yang menganut pola mutualistik (saling menguntungkan). Pengusaha IRT hanya memproduksi produk olahan sesuai pesanan dari bapak angkat. Pembinaan, bentuk kemasan lengkap dengan data/informasi tentang produk, pasar dan distribusi tanggung jawab bapak angkat. Sistem ini satu jenis produk dengan standar mutu yang sama tetapi bisa dilakukan oleh banyak IRT. Produk olahan ditetapkan harga dasar produk dari konsumen berdasarkan harga kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan.
 - b. Memperkuat kemitraan pasar antara pemilik tempat dagang/outlet/kios dengan pengusaha IRT. Cara seperti sudah berjalan dan seharusnya pedagang yang menjadi mitra membuat persyaratan bagi IRT untuk produk olahannya untuk memenuhi standar diantaranya pada kemasan harus mencantumkan beberapa data/informasi tentang produknya seperti halnya disebutkan di atas. Dengan cara demikian secara tidak langsung akan memperkuat daya saing produk yang dijual di kios/outlet mitra dagang menghadapi MEA.
4. Pencerdesan konsumen dalam artian konsumen perlu diberikan pemahaman dalam memilih produk olahan yang berkualitas, kandungan gizi, komposisi, sesuai dengan keyakinan masing-masing dan tidak hanya melihat tampilan baik produk maupun kemasannya saja.

KESIMPULAN

Potensi pengembangan industri rumah tangga (IRT) produk olahan makanan jadi cukup besar. Jumlah IRT yang tumbuh mencapai 4.292 unit dan mampu menyerap tenaga kerja 14.945 orang dan memberikan nilai tambah sebesar Rp. 413,0 milyar per tahun. Kasus IRT di Sumatera Barat masih mempunyai beberapa kelemahan: (1) Belum semua IRT mempunyai izin usaha dan mencantumkan label halal MUI pada kemasan, kecuali industri kecil dan menengah; (2) Masa layak guna merupakan informasi penting belum semuanya mencantumkan dengan tegas; (3) Kandungan gizi tidak tercantum dan hanya mencantumkan komposisi produk; (4) Alamat sudah dicantumkan cukup jelas, dan (5) Kemasan sebagai besar sudah menarik kecuali IRT mandiri dan UP3HP. Kelemahan produk olahan IRT tersebut harus dibenahi untuk memperkuat daya saing dalam pasar bebas MEA. Untuk itu diperlukan fasilitasi dan regulasi oleh pemerintah (i) pembinaan menuju efisiensi usaha dan penguatan legalitas produk dengan mencantumkan izin usaha dan berbagai

data/informasi tentang produk pada kemasan, (ii) mempermudah akses IRT ke sumber modal, (iii) Membangun kelembagaan pasar/kemitraan sistem bapak angkat untuk menjamin standar mutu dan keberlanjutan pasar yang saling menguntungkan; (iv) Meningkatkan pengetahuan konsumen dalam memilih produk olahan makanan jadi secara bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda, 2013. Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Sumatera Barat tahun 2013-2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- Bappeda, 2014. Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2014. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat..
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2015. Direktori perusahaan industri kecil dan menengah tahun 2014. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2015. Pengembangan UP3HP di Sumatera Barat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat.
- Hosen, N. 2014. *Keberadaan lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) mendukung kemandirian pangan di Sumatera Barat*. Prosiding Seminar nasional HPS ke 33. Buku I. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta. Hal. 472-481.
- Hosen, N. Nurnayetti dan Hardiyanto. 2013. *Pemberdayaan gapoktan mendukung pengembangan usaha agribisnis perdesaan di Sumatera Barat*. Artikel dalam buku: *Diversifikasi pangan dan transformasi pembangunan pertanian*. Editor: Mewa Ariani, Kedi S., Nono, SS., Rahmat H., Haryono, S., dan Effendi Pasandaran. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. IAARD Press. Hal. 494-512.
- Husen, S, 2014. *Prospek pemberlakuan MEA 2015 bagi pelaku usaha sektor pertanian*. Prosiding Seminar nasional HPS ke 33. Buku I. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kmenterian Pertanian. Jakarta. Hal. 120-137.
- Kasryno, F. 2013. *Politik revitalisasi pertanian dan dampak pelaksanaannya*. Artikel dalam buku: *Diversifikasi pangan dan transformasi pembangunan pertanian*. Editor: Mewa Ariani, Kedi S., Nono, SS., Rahmat H., Haryono, S., dan Effendi Pasandaran. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. IAARD Press. Hal. 11-51.
- Munarso, J. 2013. *Peran teknologi pengolahan mendukung diversifikasi pangan*. Artikel dalam buku: *Diversifikasi pangan dan transformasi pembangunan pertanian*. Editor: Mewa Ariani, Kedi S., Nono, SS., Rahmat H., Haryono, S., dan Effendi Pasandaran. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. IAARD Press. Hal. 419-435.
- Rahmat, M. 2013. *Perspektif pengembangan industri pengolahan pangan di Indonesia*. Artikel dalam buku: *Diversifikasi pangan dan transformasi pembangunan pertanian*. Editor: Mewa Ariani, Kedi S., Nono, SS., Rahmat H., Haryono, S., dan Effendi Pasandaran. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. IAARD Press. Hal. 303-325.
- Singarimbun, M dan Sofian Effendi. 1982. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.